



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN
PAINAN, JANUARI 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	7
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	7
2.2 Kebijakan Strategis.....	39
2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran 2021.....	40
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	41
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.....	41
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Dibawahnya.....	42
BAB V PENUTUP.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kepala Daerah dan kemudian menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pertanian. LKPJ Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gabungan dari LKPJ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan. LKPJ Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026.

LKPJ Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021; dan
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah memberikan pelaporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dibidang pertanian.

1.3.2 Tujuan

- a. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD;

- c. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan;
- d. Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

URUSAN : Pertanian

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian** Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran Rp. 33.772.918.070,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.300.510.319,50 (tiga puluh milyar tiga ratus juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas lima puluh sen rupiah) dengan tingkat realisasi mencapai 89,72% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Non Urusan 2. Pertanian	Dinas Pertanian	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja						33.772.918.070	30.300.510.319,50
A	Non Urusan								20.404.076.744	17.988.024.138
I				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	20.404.076.744	17.988.024.138
	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	100	203.286.260	195.471.640
	a			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Dokumen	5	5	22.544.280	19.521.140
	b			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	60	60	180.741.980	175.950.500
	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	100	19.185.427.519	16.888.104.145
	a			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN yang dibayarkan	Bulan	12	12	18.734.227.519	16.473.854.145
	b			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	Bulan	12	12	451.200.000	414.250.000

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	349.625.654	334.632.386
a				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jeniss Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	5	5	26.554.860	20.997.080
b				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	30	30	81.932.634	81.371.986
c				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	7	7	25.998.160	25.960.560
d				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis	3	3	9.000.000	5.980.000
e				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	Bulan	12	12	7.170.000	7.169.460
f				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	250	250	198.970.000	193.153.300
4				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	269.576.411	205.821.622
a				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon yang dibayarkan	Bulan	12	12	185.591.921	121.852.662
b				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Orang	5	5	83.984.490	83.968.960
5				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	%	100	100	396.160.900,00	363.994.345
a				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	5	5	271.505.900	239.882.095
b				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah laptop/PC unit yang dielihara - Jumlah printer (peralatan Personal komputer) yang dipelihara - Jumlah A.C Split yang dipelihara	Unit Unit Unit	33 10 15	33 10 15	20.300.000	19.760.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	3	3	104.355.000	104.352.250

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Pertanian								13.368.841.336	12.312.486.182
I				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian	%	47,92	50,75	2.513.776.345	2.277.712.008
	1			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pembinaan, Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian/ Peternakan Lainnya yang dilaksanakan	Kecamatan	15	15	6.876.000	6.853.250
	a			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pembinaan, Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Sarana Pendukung Pertanian/ Peternakan Lainnya yang dilaksanakan	Kecamatan	15	15	6.876.000	6.853.250
	2			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan - Tersedianya Benih Tanaman Pangan - Tersedianya bibit Tanaman Hortikultura - Tersedianya bibit Perkebunan - Jumlah ternak yang dipelihara - Jumlah Frozen Semen yang disediakan	Jenis Kg Batang Batang Ekor Straw	3 307,50 3.720 3.896 49 5.418	3 307,50 3.720 3.896 49 5.418	793.248.845	732.461.265
	a			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah benih penjenis varietas bawaan yang diperbanyak - Jumlah bibit porang bersertifikat yang disediakan	Kg Kg	20 307,50	20 307,50	224.482.845	213.816.175
	b			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	- Jumlah akseptor IB yang disediakan - Jumlah Nitrogen cair yang disediakan	Ekor Liter	5.000 1.500	5.000 1.500	163.700.000	150.961.250
	c			Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	- Jumlah ternak yang dipelihara - Jumlah pakan ternak yang disediakan - Jumlah bibit kelapa sawit yang disediakan - Jumlah bibit durian yang disediakan	Ekor Kg Batang Batang	49 5.268 3.896 3.720	49 5.250 3.896 3.720	405.066.000	367.683.840

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan ternak sapi	Kelompok	14	14	1.713.651.500	1.538.397.492,50
a				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ternak yang disediakan	Ekor	148	148	1.713.651.500	1.538.397.492,50
II				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Jumlah Indeks Pertanaman Per Tahun	Kali	2,31	2,39	6.705.478.147,00	6.315.088.920
					- Persentase Ternak Unggul	%	7	8,16		
1				Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi	Ha	25.219	25.219	11.598.790	7.997.820
a				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas lahan pertanian yang terlindungi dari alih fungsi lahan	Ha	25.219	25.219	11.598.790	7.997.820
2				Pembangunan Prasarana Pertanian	- Jumlah Indeks Pertanaman per Tahun	Kali	2,31	2,39	6.221.887.357	5.843.651.854
					- Persentase Ternak Unggul	%	7	8,16		
a				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	- Terfasilitasinya kegiatan pusat satker 08 - Panjang jaringan Irigasi usaha tani yang dibangun/	Kegiatan Meter	1 500	1,00 500	688.326.842	551.618.630
b				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/ direhab/ dipelihara	Meter	2.000	2.000		
c				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun/ direhab/ dipelihara	Unit	3	6	386.459.190	384.927.550
d				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah mesin tetas yang disediakan - Jumlah kandang yang diregister	Unit Unit	3 12	3 12	10.200.000	9.774.000

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan ternak itik	Kelompok	17	17	471.992.000	463.439.246
a				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah ternak itik yang disediakan	Ekor	5.796	5.796	471.992.000	463.439.246
III				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis	Kasus	150	133	188.197.400	187.691.300
1				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hewan yang dikendalikan dari penyakit	Ekor	3.940	4.610	42.799.000	42.726.650
a				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan	Jumlah hewan yang dikendalikan dari penyakit rabies	Ekor	2.640	2.640	18.224.000	18.166.400
b				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ternak yang dibebaskan dari penyakit Septicaemia Epizootica (SE)	Ekor	1.300	1.300	24.575.000	24.560.250
2				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produk pangan asal hewan yang diawasi	Jenis	5	5	32.345.000	32.342.300
a				Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produk pangan asal hewan yang diperiksa	Sampel	24	48	32.345.000	32.342.300
3				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pusat kesehatan hewan (Puskesmas) yang melayani	Unit	6	6	113.053.400	112.622.350
a				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah alat laboratorium kesehatan hewan yang disediakan	Jenis	4	4	7.468.500	7.037.450
b				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan/ternak yang diberikan pelayanan medik	Ekor	2.490	2.684	105.584.900	105.584.900

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	159.465.445	158.748.505
	1			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	- Penurunan luas serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura - Penurunan luas serangan OPT	Ha Ha	150 300	150 300	159.465.445	158.748.505
	a			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman	Orang	525	525	159.465.445	158.748.505
					- Jumlah pestisida untuk sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang	Liter	853	853		
V				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Unit Usaha Yang diberikan Rekomendasi Izin Usaha	Unit	180	25	181.345.660	35.648.450
	1			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha	Unit	180	25	181.345.660	35.648.450
	a			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan	Dokumen	180	25	21.124.000	20.802.000
	b			Pembinaan dan Pegawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	- Jumlah pupuk yang disediakan - Jumlah kios pertanian yang dibina/awasi	Kg Unit	16.774 126	- 126	160.221.660	14.846.450
VI				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	Kelompok	25	25	3.620.578.339	3.337.596.999
	1			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Jumlah kelembagaan tani yang meningkat SDM nya - Jumlah petani yang meningkat SDM nya	Kelompok Orang	977 700	1.012 700	3.620.578.339	3.337.596.999
	a			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Jumlah Training yang dilaksanakan - Fasilitasi kegiatan Konstratani - Jumlah program penyuluhan yang disusun - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan produk pasca panen komoditi peternakan - Jumlah Penilaian Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan	Kali Kecamatan Dokumen Orang Kali	180 15 16 20 1	180 15 16 - 1	475.056.290	404.438.300

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Jumlah kelompok tani, gabungan Kelompok Tani, LKMA dan UPJA yang dibina	Kelompok	977	1.012	65.856.950	57.661.920
					- Luas lahan padi sawah kelompok tani yang ikut Asuransi Usaha Tanaman padi (AUTP)	Ha	1.000	444,75		
					- Jumlah Penilaian Petani dan Kelembagaan Petani yang dilaksanakan	Kali	1	1		
c				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Hand Tranctor yang disediakan	Unit	2	2	1.610.443.460	1.436.019.434
					- Jumlah Kendaraan Roda 3 yang disediakan	Unit	1	1		
					- Jumlah Combine Harvester yang disediakan	Unit	2	2		
					- Jumlah Cultivator yang disediakan	Unit	8	8		
					- Jumlah Tractor Angkut yang disediakan	Unit	1	1		
					- Jumlah Alat dan Mesin Brigade Tanam yang Dipelihara	Unit	49	49		
					Jumlah Kendaraan Dinas Penyuluh Pertanian Lapangan yang disediakan	Unit	4	4		
					- Jumlah Hand sprayer yang disediakan	Unit	56	56		
d				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah petani yang ikut sekolah lapang budidaya komoditi tanaman pangan	Orang	700	700	1.469.221.629	1.439.477.345
					- Jumlah Laptop Penunjang Kegiatan Hibah IPDMIP yang disediakan	Unit	2	2		
					- Terfasilitasinya kegiatan hibah IPDMIP	Kegiatan	1	1		
Jumlah									33.772.918.080	30.300.510.320

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKjIP	88,20 (A)	87,76 (A)*	99,50
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	706.938	717.863	101,55
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Perizinan Usaha Pertanian				
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha)	49,00	63,47	129,53
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1,00 1,80 0,80	1,84 9,58 3,23	184,00 532,22 403,75
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Sapi (%)			
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	b. Itik (%)			
			c. Ayam Buras (%)			
3	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)	25	25	100%

*) : Data Capaian 2020 (Data 2021 belum tersedia)

- **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.**

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu

1.1. Nilai LkjIP (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 99,50%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Output dari program ini adalah tercapainya persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua Sub Kegiatan yaitu :
 - 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksana penyusunan dokumen evaluasi kinerja (rapat-rapat evaluasi

internal perangkat daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, laporan evaluasi hasil renja, penyediaan data statistik.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini terdiri atas 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis logistik kantor;

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan bahan cetak dan penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan yaitu surat kabar/koran harian;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas;
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon ;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, output kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang berkondisi baik. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan, output sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang terpelihara;

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan kegiatan dinas;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

2. Meningkatnya Produksi Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

2.1. Jumlah Produksi Pertanian (Ton) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 101,55%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan dan Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, output sub kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. output sub kegiatan adalah tersedianya bibit durian dan bibit kelapa sawit.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Output program ini adalah pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, output kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan pengadaan sarana pengendalian (Pengadaan Pestisida).
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
Output Program ini adalah terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Output kegiatan adalah jumlah penerbitan rekomendasi izin

usaha pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) unit sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian.
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kios pertanian.

**2.2. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha)
(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 129,53%)**

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output Program ini terlaksananya indeks pertanaman. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi. Capaian kegiatan ini adalah terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi.

- b. Pembangunan Prasarana Pertanian. Output kegiatan ini adalah meningkatkan indeks pertanaman. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jaringan irigasi usaha Tani;
2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan dam parit saluran.
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pertanian lainnya.

2.3. Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)

Sapi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 184,00%)

Itik (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 532,22%)

Ayam Buras (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 403,75%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian, Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan sarana pendukung peternakan lainnya Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan sarana pendukung peternakan.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan ternak dan tersedianya frozen semen sebagai media pelaksanaan Inseminasi Buatan Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya akseptor

IB dan tersedia Nitrogen Cair serta terlaksananya pemeliharaan ternak.

- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah tersedianya Ternak yang akan diserahkan ke Kelompok Tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Output sub kegiatan ini adalah tersedia ternak untuk diserahkan ke Kelompok Tani.
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output program ini adalah meningkatkan persentase ternak unggul. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah ketersediaan bantuan ternak itik kepada kelompok tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, Output sub kegiatan adalah tersedianya ternak itik untuk diserahkan ke kelompok tani.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Output program ini Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular

Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah pengendalian hewan dari penyakit rabies dan SE (Septicaemia Epizootica). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit rabies pada hewan.
 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit SE (Septicaemia Epizootica) pada hewan ternak.
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengujian sampel produk pangan asal hewan.
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Laboratorium. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan laboratorium untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan medik veteriner.

3. Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

3.1 Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100,00%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyuluhan Pertanian, output Program ini meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik kelas. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Output kegiatan ini adalah jumlah kelembagaan tani yang meningkat SDM nya dan jumlah petani yang meningkat SDM nya. Kegiatan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan programa penyuluhan, fasilitasi kegiatan konstratani, pelaksanaan traning di Balai Penyuluhan Pertanian se Kabupaten Pesisir Selatan, serta pelatihan produk pasca panen komoditi peternakan.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, LKMA dan UPJA yang dibina dan Fasilitasi kegiatan AUTP.
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Output sub kegiatan ini adalah tersedianya alat dan mesin pertanian.
4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah dari sub kegiatan ini adalah jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, saat ini baru sekitar 8 - 10% dari kebutuhan petani. Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
 - a) Prasarana

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan – lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu,

ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

b) Sarana

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk

bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM)

yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/peternak dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- Pesisir Selatan masih kekurangan sekitar 96 orang penyuluh, idealnya 1 orang penyuluh 1 nagari. Jumlah penyuluh yang ada di Pesisir Selatan saat ini baru mencapai 116 orang termasuk yang merangkap menjadi Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Supervisor (PP Supervisor), sedangkan jumlah nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182.
- Tenaga Medis sebanyak 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 6 (enam)

unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 15 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.

- Inseminator, ada 23 orang petugas sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan, idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang atau masih kurang 18 orang.
- Pemeriksa Kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB.
- Asisten Teknis Reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.
- Sterility Control (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap Puskesmas harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.
- Belum adanya Tenaga Labor Kesehatan Hewan, Tenaga Labor Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Juru Kesehatan Hewan.

8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai

jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.

9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak.

Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin dan obat-

obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang hygienis dan sanitasi kandang.

11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (*not marketable*)

atau tidak layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (losses), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan

Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan berupa Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4).

15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul

Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah asektor IB 9.000 ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 2.000 dosis setiap tahun dan Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat rata-rata 8.000 dosis setiap tahun, dengan demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 2.000 dosis per tahun.

16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan
- Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

b. Solusi

1. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.
2. Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
Sarana Pertanian
Pengadaan Sarana Pertanian
3. Perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan agroinput dalam budidaya pertanian.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
6. Meningkatkan SDM petugas dan petani/peternak melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Pengelolaan kelembagaan petani secara optimal.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Perda LP2B.
9. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian.

10. Peningkatan pemanfaatan akselerasi inovasi teknologi hilirisasi.
11. Menurunkan tingkat kehilangan hasil produksi pertanian.
12. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
13. Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan dan Tanaman.
14. Penyediaan Bibit unggul pertanian.

2.2 Kebijakan Strategis

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gabungan dari 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu 1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.2

Kebijakan Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Perubahan SOTK	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	Landasan, arah, pedoman dan prioritas pembangunan pertanian ditingkat Kabupaten sampai Kecamatan baik itu SDM maupun SDA pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tani Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.444.125.000,00 dengan realisasi Rp. 3.240.810.100,00 (94,07%)

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN	3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07
Total			3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan 2021

3.1.1 Permasalahan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;

3.1.2 Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Jika revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota;

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dibawahnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen masyarakat tani yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan pertanian. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pembangunan pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan pertanian pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khusus para petani/kelompok tani/gapoktan/KEP dan stake holder yang mendukung

situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pembangunan pertanian dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan pertanian Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan pertanian senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.